

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Didalam konteks pembangunan, bangsa Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat materil maupun spiritual. Dalam rangka pembangunan nasional di Indonesia, pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyelaraskan laju pertumbuhan antar daerah dan pembangunan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah masing-masing untuk meningkatkan kemampuan daerah tersebut. (Nurrohman, 2010)

Kebijakan otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001, menghendaki masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah serta dapat menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang antara lain: meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan (HAW. Widjaja, 2002).

Dengan diberlakukannya otonomi daerah diseluruh wilayah Indonesia, sebagai konsekuensi pemerintah pusat memberlakukan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang terfokus pada otonomi daerah dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah

daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur anggaran daerahnya sendiri. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan.

Melalui pelimpahan kewenangan ini peranan keuangan daerah akan semakin penting karena pemerintah daerah dituntut untuk lebih aktif dalam mengelola sumber dananya sendiri. Artinya daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian keuangan sendiri yang terbesar (Tambunan, 2001).

Pajak daerah sesuai dengan pasal 1 angka 6 UU No. 34/2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak sebagai salah satu sumber terbesar penerimaan daerah sangat berperan penting dalam mempercepat pembangunan di daerah. Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak eksklusif pemerintah, pungutan tersebut dilandaskan oleh undang-undang. Pemungutan pajak dapat dipaksakan kepada subjek pajak yang dimana tidak ada balas jasa yang langsung ditunjukkan penggunaannya (Mangunkusubroto, 2001).

Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, namun daerah kabupaten/kota diberikan kebebasan untuk menggali potensi-potensi dalam sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang sudah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Penyumbang terbesar dari pendapatan asli daerah Sumatera Barat berasal dari penerimaan pajak. Maka oleh sebab itu pemerintah Sumatera Barat wajib mengatur, mengelola dan memaksimalkan penerimaan pajak, yang bertujuan untuk pembangunan dan kesejahteraan penduduk.

Penerimaan pajak di Provinsi Sumatera Barat selama rentang waktu 10 tahun terakhir selalu meningkat dari tahun ke tahun, hanya pada tahun 2009 penerimaan pajak Sumatera Barat mengalami penurunan. Angka penerimaan pajak pada tahun 2007 adalah sebanyak Rp. 479.453.172.000 dan pada tahun 2016 Rp. 1.522.000.000.000. Peningkatan penerimaan pajak daerah Sumatera Barat selama 10 tahun yaitu dari tahun 2007 sampai tahun 2016 yaitu sebanyak Rp. 1.042.546.828.000 dengan persentase peningkatan sebesar 218,81%. Rata-rata laju pertumbuhan penerimaan pajak di Sumatera Barat dari tahun 2007 sampai 2016 sebesar 14,49% pertahunnya. (BPS 2017). Laju pertumbuhan penerimaan pajak di Sumatera Barat yang selalu meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan 14,49% pertahun diduga disebabkan karena ada pengaruh langsung dari jumlah penduduk.

Jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2007 sampai 2016 selalu meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2007 jumlah penduduk sebanyak 4.697.764 jiwa dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 5.259.528 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk di Sumatera Barat dari tahun 2007 menuju tahun 2016 yaitu sebanyak 561.764 jiwa dengan persentase peningkatan sebesar 11,98%. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Sumatera Barat dari tahun 2007 sampai 2016 yaitu sebesar 1,26% pertahunnya (BPS, 2017). Diduga yang memiliki pengaruh langsung terhadap penerimaan pajak selain jumlah penduduk, yaitu pendapatan perkapita.

Pendapatan perkapita di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2007 sampai 2016 selalu meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2007 total pendapatan perkapita Rp. 6.588.229 dan

pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 10.420.867. Peningkatan pendapatan perkapita di Sumatera Barat selama periode tahun 2007 menuju tahun 2016 yaitu sebanyak Rp. 3.832.638 dengan persentase peningkatan sebesar 58,17 %. Rata-rata laju pertumbuhan pendapatan perkapita di Sumatera Barat selama periode tahun 2007 sampai 2016 yaitu sebesar 4,72% pertahunnya (BPS, 2017). Selain memiliki pengaruh langsung, diduga jumlah penduduk dan pendapatan perkapita memiliki pengaruh tidak langsung terhadap penerimaan pajak melalui PDRB.

PDRB Provinsi Sumatera Barat (atas dasar harga konstan tahun 2000), dari tahun 2007 sampai 2016 selalu meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2007 PDRB Sumatera Barat adalah Rp.30.949.945.100.000 dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp.54.808.845.856.454. Peningkatan PDRB Sumatera Barat selama periode 2007 sampai 2016 yaitu sebesar Rp.23.858.900.746.454 dengan persentase peningkatan sebesar 77,08%. Rata-rata laju pertumbuhan PDRB Sumatera Barat dari tahun 2007 sampai 2016 yaitu sebesar 6,22% pertahunnya (BPS, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas dan perkembangan fenomena penerimaan pajak diduga dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan pendapatan perkapita secara langsung di Sumatera Barat. Dimana jumlah penduduk dan pendapatan perkapita selalu meningkat dan total penerimaan pajak yang juga cenderung meningkat meskipun terjadi penurunan pada tahun 2009. Dan penulis ingin melihat pengaruh tidak langsung jumlah penduduk dan pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak melalui perantara PDRB. Berdasarkan hal itu maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG JUMLAH PENDUDUK, PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI SUMATERA BARAT TAHUN 2007-2016” (APLIKASI MODEL JALUR DENGAN VARIABEL PERANTARA PDRB).**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh jumlah penduduk secara langsung terhadap penerimaan pajak selama periode 2007-2016 di Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah pengaruh pendapatan perkapita secara langsung terhadap penerimaan pajak selama periode 2007-2016 di Sumatera Barat?
3. Bagaimanakah pengaruh jumlah penduduk secara tidak langsung (melalui variabel perantara PDRB) terhadap penerimaan pajak selama periode 2007-2016 di Sumatera Barat?
4. Bagaimanakah pengaruh pendapatan perkapita secara tidak langsung (melalui variabel perantara PDRB) terhadap penerimaan pajak selama periode 2007-2016 di Sumatera Barat?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh langsung jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak selama periode 2007-2016 di Sumatera Barat.
2. Menganalisis pengaruh langsung pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak selama periode 2007-2016 di Sumatera Barat.
3. Menganalisis pengaruh tidak langsung jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak selama periode 2007-2016 di Sumatera Barat (melalui variabel perantara PDRB).

4. Menganalisis pengaruh tidak langsung pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak selama periode 2007-2016 di Sumatera Barat (melalui variabel perantara PDRB).

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh langsung jumlah penduduk dan pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak dan pengaruh tidak langsung jumlah penduduk dan pendapatan perkapita melalui variabel perantara PDRB terhadap penerimaan pajak.
2. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi.
3. Bagi Universitas, dapat dijadikan sumbangan keilmuan dan menambah daftar kepustakaan.
4. Bagi masyarakat, mahasiswa maupun peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik terkait, dapat dijadikan sebagai rujukan serta tambahan informasi.

1.5 RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian akan dapat dilakukan secara terarah dan lebih fokus atas masalah yang diteliti maka perlu adanya ruang lingkup penelitian yaitu waktu penelitian (*times series*) yang digunakan dimulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 dan daerah penelitian adalah Provinsi Sumatera Barat. Variabel exogenous atau independen yang diteliti adalah total jumlah penduduk dan total pendapatan perkapita. Variabel endogenous perantara adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000. Sedangkan variabel endogenous tergantung atau dependen adalah total penerimaan pajak daerah di Sumatera Barat.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari : Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Gambaran Umum Daerah Penelitian, Bab V Temuan Empiris dan Implikasi Kebijakan, Bab VI Penutup.

Bab I : PENDAHULUAN

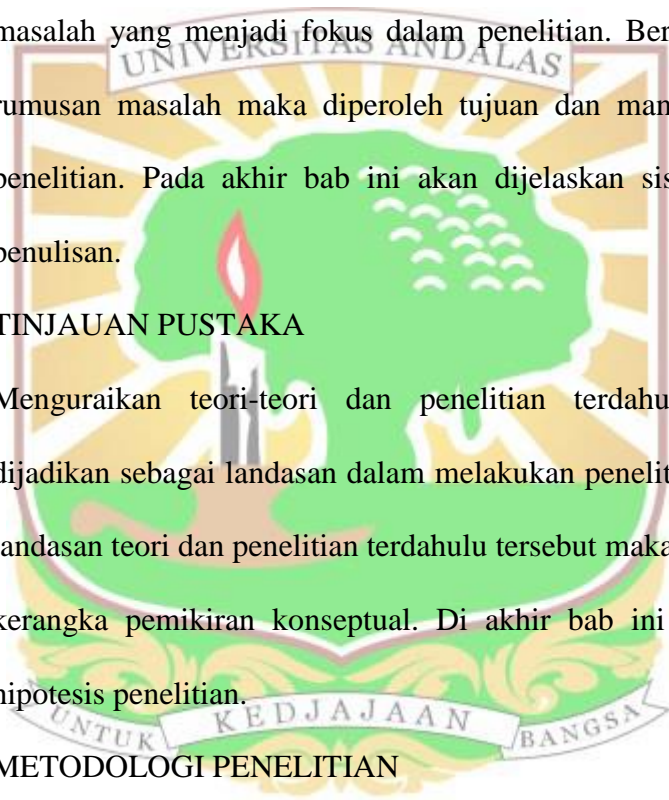
Dalam bab ini menguraikan latar belakang penelitian. Dari latar belakang yang diuraikan maka diperoleh rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah maka diperoleh tujuan dan manfaat dari penelitian. Pada akhir bab ini akan dijelaskan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan teori-teori dan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Dari landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut maka di dapat kerangka pemikiran konseptual. Di akhir bab ini terdapat hipotesis penelitian.

Bab III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel-variabel penelitian dan defenisi operasional, Jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, selain itu dalam bab ini juga terdapat ruang lingkup penelitian, serta pada akhir bab ini dilakukan pengolahan data.



Bab IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan kondisi umum daerah dan kemudian menjelaskan perkembangan jumlah penduduk, pendapatan perkapita, PDRB dan penerimaan pajak daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Bab V : TEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Dalam bab ini memuat hasil dan pembahasan dari analisa data yang telah di teliti serta merumuskan kebijakan apa yang perlu dan bisa di ambil dalam penelitian ini.

Bab VI : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan singkat dari penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi saran untuk berbagai pihak.

